

Ringkasan

KONFERENSI PERS APINDO PROSPEK EKONOMI DAN BISNIS INDONESIA 2016

“Tahun Pembuktian Kinerja Pemerintah untuk Membangun Optimisme Masa Depan Perekonomian Indonesia”

14 Desember 2015

APINDO memproyeksikan bahwa ekonomi Indonesia akan tumbuh 5,5% tahun 2016, lebih optimis dari asumsi pertumbuhan dalam RAPBN 2016 yaitu 5,3%. Proyeksi tersebut sangat moderat didasari pertimbangan atas perkembangan ekonomi global maupun reformasi ekonomi dalam negeri yang memang ada perbaikan namun belum kuat perbaikannya.

Perkembangan ekonomi global yang akan berpengaruh terhadap ekonomi nasional 2016 diantaranya: pemulihan perekonomian US dan kawasan Eropa, tumbuhnya perekonomian negara berkembang dan *emerging countries*, serta masih rendahnya harga minyak dunia yang menguntungkan bagi negara pengimpor minyak. Namun demikian perlu untuk terus dicermati perkembangan ekonomi Tiongkok yang pertumbuhannya di tahun 2016 diprediksi 6,3% (lebih rendah dari tahun 2015 yang 6,8%, dan 7,4% di tahun 2014), karena Tiongkok merupakan salah satu mitra dagang terbesar Indonesia, dimana perlambatan pertumbuhan ekonomi Tiongkok akan berimbas terhadap neraca perdagangan Indonesia.

Sementara itu, dinamika dalam negeri yang berpengaruh terhadap pertumbuhan tahun 2016 yaitu: *pertama*, perbaikan konsumsi pemerintah dan investasi dengan mempercepat pembangunan infrastruktur jalan tol, pelabuhan, listrik – sejalan dengan upaya pengurangan biaya logistik melalui pembenahan sistem logistik nasional. Penyelesaian reformasi kelembagaan juga mempercepat eksekusi belanja anggaran di berbagai bidang lainnya. *Kedua*, perbaikan iklim investasi melalui paket-paket deregulasi kebijakan ekonomi untuk *de-bottlenecking* hambatan-hambatan aktivitas usaha – termasuk di dalamnya terkait perijinan investasi. Diperkirakan investasi tumbuh 8,6%-9% yang didorong meningkatnya permintaan domestik dan aktivitas ekspor. *Ketiga*, kestabilan sosial-politik yang diperkirakan semakin baik sejalan dengan meningkatnya kemampuan pemerintah untuk mendapatkan dukungan politik dalam negeri. Berlangsungnya Pilkada serentak tahap pertama secara lancar dan damai menjadi modal kuat bagi penguatan kelembagaan politik Indonesia saat ini dan mendatang.

Berikut detail beberapa hal penting yang menumbuhkan optimism dunia usaha atas perekonomian 2016.

- **Pembentukan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) untuk mempercepat pelayanan perijinan usaha** yang telah berlangsung di awal kepemimpinan Jokowi-Jusuf Kalla sejak akhir 2015. Di bawah instruksi langsung Presiden, Kementerian teknis telah melimpahkan kewenangan pemberian perijinan-perijinan usaha utama ke BKPM. Upaya tersebut telah berhasil meningkatkan peringkat Indonesia dalam survei *Ease of Doing Business* (kemudahan berusaha) dari yang semula di posisi 120 menjadi 109 (naik 11 peringkat) yang dirilis World Bank Group. Reformasi pelayanan investasi terus ditingkatkan dengan kemudahan ijin investasi dan konstruksi di kawasan industri, dan kemudahan status perusahaan di kawasan berikat. Realisasi investasi di industri berorientasi ekspor, padat karya yang juga berorientasi ekspor, substitusi impor, hilirisasi, pertanian, maritim dan pariwisata terus ditingkatkan oleh BKPM.

- **Paket Kebijakan Ekonomi Jilid I sampai dengan Jilid VII yang mencakup deregulasi ratusan kebijakan pemerintah di berbagai sektor industri maupun lintas sektor**, dengan mengakomodir usulan-usulan matrik kebijakan dari berbagai sektor usaha yang dikoordinir oleh APINDO. Deregulasi di berbagai sektor industri maupun lintas sektor seperti pertanahan, perijinan usaha, insentif perpajakan pengupahan – sebagai kelanjutan dari reformasi struktural pemangkasan subsidi BBM menunjukkan keseriusan pemerintah untuk perbaikan perekonomian. **Paket kebijakan Pemerintah ini dinilai menyentuh pemulihan sektor riil domestik, tantangannya adalah implementasi kebijakan tersebut.** Sepenuhnya disadari oleh dunia usaha bahwa kebijakan yang baik tidak serta merta menjamin pelaksanaan yang baik. Tahun 2016 merupakan tahun pembuktian rencana-rencana besar pemerintah di bidang perekonomian.
- **Kebijakan pemerintah terbaru tentang pengupahan dalam PP 78/2015 dengan membuat formulasi penghitungan upah minimum berdasarkan faktor pertumbuhan ekonomi dan inflasi merupakan kebijakan yang positif.** Kebijakan tersebut tentu tidak sempurna, namun APINDO mendukungnya karena salah satu kontribusi besar PP tersebut adalah memberikan jaminan kepastian penghitungan upah minimum – yang berimplikasi bagi penentuan upah secara umum. Sudah selayaknya pengusaha dan pekerja mendukungnya karena menguntungkan keduanya bagi kepastian peningkatan aktivitas usaha dan jaminan kerja yang berkelanjutan. PP tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk mendukung pengembangan sektor padat karya yang masih sangat relevan untuk Indonesia mengingat hampir 50% angkatan kerja Indonesia berpendidikan SD. Sebagaimana diketahui, dari 128 juta angkatan kerja yang dicatat BPS, 120 juta merupakan tenaga kerja, 7 juta penganggur dimana dari 120 juta tenaga kerja tersebut terdapat 35 juta orang yang dikategorikan setengah menganggur. Dari 128 juta angkatan kerja terdapat 58 juta tamat SD, 20 juta tamat SMP yang menunjukkan rendahnya ketrampilan angkatan kerja Indonesia.

Kebijakan pemerintah dalam hal jaminan pensiun juga memberikan indikasi cukup positif dengan mengakomodir masukan APINDO terkait besaran tarifnya. Namun demikian total pungutan ketenagakerjaan yang mencapai 19,74% bagi perusahaan dari penghasilan pekerja untuk perlindungan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan merupakan beban yang terlalu tinggi khususnya bagi industri padat karya. Di tahun 2016 pemerintah harus serius untuk melakukan sinkronisasi kebijakan-kebijakan terkait perlindungan sosial ini demi peningkatan daya saing industri.

- **Dalam hal kebijakan perekonomian internasional secara khusus MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN), pada dasarnya Indonesia telah menjalaninya lebih dari sepuluh tahun terakhir.** Hal tersebut didasari kenyataan bahwa dalam hal aliran barang, sejak tahun 2010 sudah lebih dari 98% tariff bea masuk barang antar negara ASEAN sebesar 0% sehingga perekonomian Indonesia sudah lama terbiasa menjalaninya. Mengenai jasa, kekhawatiran akan serbuan jasa di tahun 2016 akibat MEA tidak berdasar karena komitmen Indonesia atas sektor jasa ini sama tingkatnya dan bahkan lebih rendah dari jasa yang sudah berlangsung selama ini. Akan halnya dengan kekhawatiran terhadap serbuan tenaga kerja terampil di tahun 2016 juga hanya kekhawatiran semu karena disepakatinya MRA (*Mutual Recognition Arrangement*) atas 8 bidang profesi selain masih harus dilengkapi sejumlah tahap teknis lanjutan, juga bukan merupakan kebebasan untuk bekerja, namun merupakan pengakuan kesamaan kualifikasi pendidikan-ketrampilan. Persoalannya adalah keseriusan Indonesia untuk terus memperbaiki kualitas kebijakan maupun konsistensi implementasinya.

Sementara itu, kebijakan perdagangan internasional dalam skema CEPA (*Comprehensive Economic Partnership Agreement*) Indonesia dengan European Union yang dijadikan prioritas untuk diwujudkan dalam 2 tahun mendatang adalah positif mengingat sifatnya yang komplementer bagi perekonomian Indonesia. Secara konseptual CEPA akan menguntungkan kedua belah pihak, maka APINDO mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan negosiasi CEPA tersebut.

Dalam hal TPP (*Trans Pacific Partnership*) sejumlah deregulasi dan debirokratisasi di bidang perekonomian memberikan indikasi positif atas kemampuan pemerintah dalam mewujudkan

niatnya untuk bergabung dalam TPP. APINDO menyikapi positif kehendak pemerintah Indonesia untuk bergabung dengan TPP, namun Indonesia harus secara hati-hati mencermati beberapa hal yang terdapat dalam klausul perjanjian antar negara-negara di dalam TPP yang berpotensi negatif serta merugikan dunia usaha Indonesia nantinya. Untuk ikut serta dalam TPP, harus ada kepemimpinan yang sangat kuat untuk menjamin keberlanjutan reformasi ekonomi di Indonesia, khususnya di bidang regulasi dan kelembagaan, yang ditujukan untuk menyelaraskan dengan kesepakatan-kesepakatan yang muncul di dalam platform perjanjian diantara negara-negara yang bergabung di dalam TPP tersebut.

- **Faktor lain yang menumbuhkan optimisme adalah reformasi struktural yang dilakukan dengan pemangkasan subsidi BBM untuk dialihkan ke aktivitas produktif, serta penyelesaian sejumlah agenda reformasi kelembagaan pemerintah yang dapat mempercepat eksekusi anggaran belanja pembangunan.** Peningkatan yang signifikan dalam alokasi anggaran infrastruktur dan pendidikan diharapkan meningkatkan produktivitas Indonesia dalam jangka menengah maupun panjang jika dilaksanakan dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Lebih lanjut, koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah menjadi prasyarat penting dalam sistem pemerintahan Indonesia yang desentralistik.
- **Faktor-faktor tersebut di atas telah menunjukkan kontribusi positifnya yang terlihat dari realisasi investasi yang naik 16,6% dan meningkatnya daya serap tenaga kerja 10,44%** setidaknya yang ditunjukkan data periode Januari sampai dengan September 2015. Kontribusi realisasi PMA naik 16,8% dan PMDN meningkat 16,5%. Negara-negara Asia tetap menjadi kontributor terbesar sekitar setengah dari total realisasi investasi di Indonesia. Minat investasi tahun 2016 diprediksikan naik 16% dengan target realisasi mencapai Rp. 594,8T untuk nantinya dapat terus naik target-nya setiap tahun (2017: 678,8 T; 2018: 792,5T; 2019: 933T).

Terimakasih.

DPN APINDO
Gedung Permata Kuningan
Lantai 10. Jl. Kuningan Mulia Kavling 9C
Guntur – Setiabudi,
Jakarta Selatan 12980

